

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN



Pengertian tentang partisipasi oleh banyak ahli biasanya diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan, yang bila dikaitkan dengan pembangunan maka akan merupakan upaya peran serta masyarakat dalam pembangunan. Istilah lain partisipasi yang sering digunakan adalah peran serta, keterlibatan dan keikutsertaan yang terwujud di dalam sikap gotong-royong. Menurut Budiono (1999), gotong-royong adalah usaha yang dilakukan secara bersama tanpa imbalan yang ditujukan untuk kepentingan bersama. Dalam makna yang sama Widiyanti dan Sunindha (1989) mendefinisikannya sebagai suatu usaha yang diselenggarakan secara bersama yang dapat diwujudkan dalam pengertian partisipasi. Achmadi (1978) menambahkan bahwa partisipasi, masyarakat dalam bentuk swadaya gotong-royong merupakan modal utama. Sedangkan swadaya diartikannya sebagai kemampuan dari suatu kelompok masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan iktihar pemenuhan kebutuhan. Menurut Cohen dan Uphoff (Ndraha;1990) bahwa partisipasi dapat merupakan keluaran dan masukan pembangunan. Bentuk partisipasi

yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam program pembangunan terdiri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan, dan evaluasi pembangunan.

Berkaitan dengan pengertian partisipasi dan kaitannya dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka partisipasi menjadi elemen yang sangat penting. Tanpa perhitungan partisipasi masyarakat, program pembangunan yang akan dilaksanakan merupakan perencanaan diatas kertas (Pusic dalam Adi;2001). Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari dua hal yaitu; partisipasi dalam perencanaan dan partisipasi dalam pelaksanaan. Kedua hal tersebut mempunyai segi positif dan segi negatife, baik dalam bentuk partisipasi dalam perencanaan dan partisipasi dalam pelaksanaan.

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah dapat mendorong munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program-program pembangunan yang direncanakan bersama, sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindarinya pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya suatu keputusan bersama.

Segi positif dari partisipasi dalam pelaksanaan adalah sebagian besar dari suatu program (tentang penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Segi negatifnya adanya kecenderungan menjadikan warga masyarakat sebagai objek pembangunan, dimana warga masyarakat dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi, dan tanpa timbulnya keinginan untuk mengatasi masalahnya. Akibatnya, warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Menurut Tjokroamidjojo (1990) bahwa dalam partisipasi terdapat tiga tahapan, yaitu;

1. Keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan dalam perencanaan.
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan.

Selanjutnya Suratmo (1995) menyatakan bahwa tujuan dasar dari partisipasi masyarakat Indonesia adalah:

- a) mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,
- b) mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan Negara
- c) membantu pemerintah untuk dapat mengambil kebijaksanaan dan keputusan yang lebih baik dan tepat.

Partisipasi menuntut adanya keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dapat secara langsung dan tidak langsung. Keterlibatan secara langsung, misalnya ikut serta secara langsung dalam melaksanakan suatu kegiatan (fisik terlibat); sedangkan keterlibatan secara tidak langsung misalnya seseorang secara fisik tidak ikut terlibat secara langsung dalam suatu kegiatan tetapi memberikan bantuan material atau sumbangan pikiran dalam kegiatan tersebut.

Pengertian partisipasi masyarakat menurut Keith Davis adalah "Participation is defined as mental and emotional involvement of a person in group situation in which encourages him to contribute to group". Defenisi ini mengandung pengertian sebagai berikut;

- a) Partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang yang lebih dari sekedar keterlibatan fisik.
- b) Partisipasi memotivasi orang-orang untuk mendukung situasi tumbuhnya inisiatif untuk mencari sasaran / tujuan kelompoknya.
- c) Partisipasi mendorong orang untuk merasa ikut serta bertanggungjawab atas aktivitas kelompok (Keith Davis, dalam media info kesos, 2010; 133)

Keterlibatan mental dan emosional akan mendorong kesadaran sehingga tumbuh motivasi dari masing-masing individu dalam masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Dalam berpartisipasi di dalamnya memiliki arti kepedulian sosial dan kesetiakawanan sosial. Kepedulian sosial atau kesetiakawanan sosial yaitu suatu rasa empati yang diwujudkan dalam bentuk tindakan atau perilaku membantu orang lain yang mengalami kesulitan dan untuk mewujudkannya memerlukan kesadaran dan tanggungjawab. Sebagaimana diungkapkan Haryadi Subadio (1991; 10) bahwa kesetiakawanan sosial pada hakekatnya merupakan tenggang rasa, kemampuan

menempatkan diri dalam situasi dan kesulitan orang lain, sehingga tidak bersikap semena-mena, sanggup merasakan dan mewujudkan toleransi terhadap keadaan orang lain, serta rela mengulurkan tangan bila diperlukan. Partisipasi sosial, kepedulian sosial dan kesetiakawanan sosial terhadap orang lain merupakan bentuk empati yang tercermin dalam kesediaan melakukan suatu tindakan atau perbuatan membantu orang lain yang mengalami kesulitan.

Berdasarkan pengertian tentang partisipasi masyarakat yang telah dikemukakan diatas, maka dapat juga disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan/keterlibatan masyarakat secara aktif baik secara moril maupun materil, yang bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama yang didalamnya menyangkut kepentingan individu. Dengan begitu, terlihat jelas bahwa peran serta masyarakat menjadi demikian pentingnya didalam setiap bentuk kegiatan pembangunan, karena dengan dukungan masyarakat yang saling berinteraksi senantiasa memberikan harapan kearah berhasilnya suatu kegiatan.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri pokok dari partisipasi yaitu kesediaan untuk turut serta dalam suatu kelompok. Dimana adanya keterkaitan perasaan dan pikiran dalam situasi kelompok, sehingga mendorong seseorang untuk membantu berhasilnya pencapaian tujuan kelompok. Dari pengertian mengenai partisipasi yang mengacu pada Davis diatas, dapat diambil tiga unsur pokok yaitu kesadaran, rasa memiliki, dan tanggungjawab dalam pengelolaan sampah domestik. Dari penjelasan mengenai istilah partisipasi diatas dapat penulis nyatakan bahwa, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dari sejumlah individu yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu.

Dengan demikian partisipasi masyarakat dapat dikategorikan kedalam suatu proses, misalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah domestik di Kelurahan Binjai. Hal yang sama dikatakan oleh Sastropetro (1988) bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Hampir senada dengan pendapat Hetifah (2002) mengemukakan bahwa partisipasi

dimaknai sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah atau kepentingan eksternal. Dengan kata lain, partisipasi dianggap sebagai kemauan rakyat untuk menciptakan pembangunan masyarakat secara mandiri. Maka partisipasi merupakan bentuk praktis dari aspirasi, inisiatif dan keterlibatan warga. Akan tetapi permasalahannya, konsep partisipasi tidak bisa dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah ataupun warga sendiri.

Ada ambiguitas konsep dan aplikasi partisipasi dalam tataran praktis. Selain itu, lokalitas dan dimensi waktu juga menjadi penentu maksimalnya ruang partisipasi masyarakat. Dr.Sudarshan dalam jurnal Syamsul Wathoni (2006) mensyaratkan bahwa partisipasi maksimal hanya bisa dilakukan dengan memperhatikan dua hal mendasar Pertama; struktur kelembagaan yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi dan memutuskan persoalan mereka sendiri. Kedua; representasi masyarakat yang terwakili secara proporsional didalam setiap proses pengambilan kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan bersama.

Namun begitu, Ignas Kleden (2004) melihat partisipasi bukan dari kuantitas, yang lebih menekankan pada angka-angka dan jumlah warga yang berpartisipasi akan tetapi lebih pada kualitas wacana partisipasi yang dikembangkan. Kualitas wacana yang dimaksud ditentukan oleh dua aspek; argumentasi yang baik dan mempunyai dasar yang kuat, kepentingan yang lebih luas yang dipertaruhkan. Agar partisipasi lebih bermakna, argument untuk partisipasi dan akuntabilitas institusional harus didasari oleh konsepsi hak, yang dalam konteks pembangunan memperkuat status warga negara. Jika semula warga dirumuskan sebagai pemanfaat, sekarang ini sudah harus diposisikan sebagai pihak yang berhak dan sah atas pembangunan itu.

Selanjutnya Asngari (2001) menyatakan bahwa, penggalangan partisipasi itu dilandasi adanya pengertian bersama. Adanya pengertian tersebut adalah karena diantara orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam menggalang peran serta semua pihak diperlukan : (a) terciptanya suasana yang bebas atau demokratis dan (b) terbinanya kebersamaan.

S.P. Hadi (1995) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses dimana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Ditinjau dari segi kualitas, partisipasi adalah sebagai masukan kebijaksanaan, strategis, komunikasi, media pemecahan publik dan terapi sosial. Keikutsertaan masyarakat ini akan membawa pengaruh positif, dimana mereka akan bisa memahami atau mengerti berbagai permasalahan yang muncul serta memahami keputusan akhir yang akan diambil. Keterlibatan masyarakat merupakan bagian dari proses perencanaan yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan, aspirasi masyarakat yang terkena dampak sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat dihilangkan serta sebagai upaya para perencana untuk memperoleh input dari masyarakat tentang segala sesuatu yang menyangkut nasib mereka.

Lebih lanjut S.P Hadi menyatakan untuk mencapai sasaran tersebut terdapat dua elemen partisipasi yang harus dipenuhi oleh masyarakat yakni: adanya komunikasi dua arah yang terus menerus dan informasi yang berkenaan dengan proyek, program dan kebijaksanaan disampaikan dengan bermacam-macam teknik yang tidak hanya pasif dan formal tetapi juga aktif dan informal. (sumber : environmental sanitation's journal)

